

**RINGKASAN DAN REVIEW MAKALAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAS
DALAM PERTEMUAN FORUM DAS DAN PAKAR TINGKAT NASIONAL
MENGENAI “STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN DAS TERPADU” DI
JAKARTA, 10-11 DESEMBER 2009**

1. RINGKASAN

Ringkasan mengenai permasalahan dan Pengelolaan Strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) ini disusun dari beberapa literatur yang disampaikan oleh **Dr. Maria Ratnaningsih** (Narasumber Diskusi Kelompok Sumberdaya), Tim Perumus umum yaitu : **Prof. Naik Sinukaban, Dr. Maria Ratnaningsih, Dr. Saeful Rachman** dan **Dr. Syaiful Anwar** dalam Pertemuan Forum DAS dan Pakar Tingkat Nasional mengenai “Strategi Nasional Pengelolaan DAS Terpadu” di Jakarta, 10-11 Desember 2009; kemudian materi diskusi dari kelompok Sistem Informasi dengan narasumber **Dr. Suria D. Tarigan** dan materi diskusi kelompok Biofisik (ekosistem) DAS dengan narasumber **Dr. Chay Asdak** dan **Prof. Naik Sinukaban**. Adapun ringkasan dari permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pokok permasalahan DAS.

Pengelompokan pokok permasalahan DAS, sebagaimana yang dikaji dalam literatur di atas, meliputi :

- (a) Ekonomi Sumberdaya DAS.
- (b) Biofisik (Ekosistem) DAS.
- (c) Strategi Nasional Pengelolaan DAS Terpadu.
- (d) Sistem Informasi DAS (SIMDAS).
- (e) Sistem Sosial, Budaya dan Kelembagaan

2. Substansi Pokok Permasalahan DAS

Tabel : Ringkasan Permasalahan & Strategi Pengelolaan DAS

No	Naratif	Indikator	Verifikasi	Asumsi/Keterangan
1.	Ekonomi Sumberdaya DAS	1. Aspek ekonomi sumberdaya alam & lingkungan. 2. Kerusakan biofisik 3. Data & informasi 4. Distribusi manfaat	1. Mainstreaming aspek ekonomi kedalam kebijakan pengelolaan DAS. 2. Review instrument pemanfaatan SDA included perijinan. 3. Valuasi jasa lingkungan & identifikasi penyedia jasa. 4. Analisa biaya & manfaat	1. Perlu UU, PP & Perda (regulasi) & RPJM/P. 2. Full cost pricing 3. Pedoman valuasi & database 4. Internalisasi, eksternalisasi biaya, kapasitas masyarakat, insetif & disinsetif.

No	Naratif	Indikator	Verifikasi	Asumsi/Keterangan
		5. Anggaran 6. Pengelolaan bersifat sektoral (non integrated) 7. Kesadaran pengguna / penerima jasa lingkungan	5. Mekanisme pembayaran non APBN, APBD. 6. Perlu payung hukum, koordinasi, dana dan kerjasama hulu-hilir. 7. Perlu aturan & peningkatan kesadaran	5. WTP & WTA dasar negosiasi PES 6. Kerjasama & koordinasi antar sektor dan antar daerah/wilayah adm. 7. Dukungan peraturan & sosialisasi.
2.	Biofisik (Ekosistem) DAS	1. Definisi Ekosistem 2. Definisi DAS	1. Pemahaman pendekatan ekosistemik untuk keberlanjutan. 2. Pemahaman dasar & UU No. 7/2004 pasal 1 tentang pengelolaan SD Air.	Perlu pemahaman bersama. 3. Idem
2.	Biofisik (Ekosistem) DAS	3. Properties/Atribut e Ekosistem 4. Permasalahan/Isu-isu Pengelolaan DAS	3. Lingkup sub-subsistem & interdependency keterpaduannya. 4. Masalah perbedaan persepsi, batas DAS & administratif, fluktuasi debit aliran & banjir, konflik kepentingan/stake holder, degradasi hutan, kualitas air menurun, kendala alamiah /fisiografis.	3. Memahami perilaku biofisik (ekosistem) melalui daur hidrologi. 4. Perlu mengetahui isu-isu masalah secara holistik dalam upaya mencari solusi yang tepat.
3.	Sistem Informasi DAS (SIMDAS)	1. Persetujuan pengembangan SIMDAS dan perluasan akses kebutuhan 2. Model/prototype SIMDAS & Hirarki 3. Kesepemahaman tingkat nasional hingga daerah 4. Pokja penyediaan	Perlu membangun suatu kesepemahaman dan kesepakatan bersama diantara para pihak dalam upaya membangun suatu Forum DAS untuk pengembangan SIMDAS sesuai model/prototype informasi yang diperlukan oleh semua pihak/stake holder.	Perlu : 1. Regulasi 2. PP/Perda 3. Organisasi dan hirarki 4. Aturan main/sistem. 5. Kepemilikan data 6. Perangkat Halus 7. Perangkat lunak 8. Pengguna &

No	Naratif	Indikator	Verifikasi	Asumsi/Keterangan
		dan pengelolaan 5. Menyediakan buletin/jurnal forum DAS		pemanfaat jasa 9. Perlindungan data 10. Kerjasama pertukaran data.
4.	Sosial Budaya dan Kelembagaan	1. Transformasi budaya 2. Penataan Kelembagaan	1. Pendidikan dan Pelatihan untuk masyarakat DAS. 2. Pengembangan softskill dan lifeskill masyarakat 1. Pengembangan sentra-sentra pemberdayaan masyarakat. 2. Pengembangan institusi masyarakat yang sifatnya bottom up dengan difasilitasi oleh fasilitator/mediator/For DAS sehingga bisa terbentuk networking dengan kepemimpinan kolektif dan memanfaatkan dana-dana CSR atau dana pribadi, jasa lingkungan dan pemerintah. 3. Menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan untuk masyarakat sekitar DAS.	Dengan memperhatikan kearifan lokal 1. Secara terintegrasi.
4.	Sosial Budaya dan Kelembagaan		4. Kebijakan pemerintah harus kompetible dengan keinginan masyarakat 5. Mereview peraturan pengelolaan DAS diwujudkan dalam pembuatan PP atau Kepres atau peraturan perundangan yang lebih efektif misalnya memadukan UU 7, UU 41 dan UU LH, termasuk penataan	

No	Naratif	Indikator	Verifikasi	Asumsi/Keterangan
			sistem keuangan negara.	
5.	Strategi Nasional Pengelolaan DAS Terpadu	1. Batas DAS 2. Koordinasi Penanganan DAS 3. Implementasi & Peraturan Perundangan 4. Transformasi budaya. 5. Database & SIMDAS 6. UU & PP.	1. UU dan peraturan yang mengatur batas DAS, ba-tas administratif & sektor. 2. Perlu persamaan persepsi dan instrument untuk koordinasi. 3. Perlu forum DAS 4. Human eco wellbeing. 5. Regulasi, organisasi, aturan, sistem dan kerjasama. 6. Regulasi, institusional dan instrument.	1. Kepentingan sektoral & batas pemerintahan harus terkait pengelolaan DAS. 2. UU, PP dan kelembagaan serta instrumen. 3. Sebagai koordinator, mediator, fasilitator, akselerator & inovator. 4. Sikap dan perilaku para stake holder. 5. Adanya kelembagaan/forum DAS yg menyediakan data & mengelola SIMDAS. 6. Menciptakan daya pengelolaan DAS.

2. U L A S A N

Masalah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaannya baik yang bersifat strategis maupun operasional sejauh ini nampak belum ada suatu kesepahaman dan kesepakatan baik ditingkat sektoral, pemerintah dalam penetapan batas administratif serta para pengguna jasa DAS serta masyarakat sendiri.

Di sisi lain, undang-undang yang mengatur secara khusus serta peraturan pemerintah (PP) mengenai DAS saat ini belum memberikan perspektif yang luas sebagaimana DAS mempunyai fungsi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Bila melihat pada keterkaitan yang lebih luas, DAS menyediakan jasa lingkungan yang antara lain meliputi fungsi hidrologi, penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati. Namun demikian, dalam dasawarsa terakhir terjadi penurunan atau degradasi jasa lingkungan DAS sebagai akibat eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam.

Salah satu hal yang sangat menyolok dan berdampak pada permasalahan DAS adalah penebangan liar dan pengerusakan hutan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan hampir seluruh DAS cenderung mengalami degradasi lingkungan dan kerusakan fisik sehingga telah menjadi perhatian para pihak. Namun demikian pengelolaan DAS secara terpadu sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks.

Oleh karenanya, dalam upaya mengatasi permasalahan DAS dan pengelolaannya yang strategis, perlu suatu pemahaman komprehensif dan tematis yang mengerucut terhadap masalah DAS. Dari analisa literatur terhadap materi-materi kelompok diskusi tersebut, diperoleh suatu pemahaman:

1. Permasalahan DAS dan pengelolaannya yang ada saat ini belum berjalan secara terpadu (integrated), mengingat pokok-pokok permasalahan dalam lingkup DAS yang terkait dengan biofisik (ekosistem), batas wilayah administratif, pendekatan sektoral, pengguna jasa DAS serta masyarakat dalam berbagai pendekatan sosial budaya dan ekonomi masih mempunyai perspektif kepentingan yang berbeda dan belum terintegrasi.
2. Eksploitasi sumber daya DAS yang mengakibatkan degradasi lingkungan bergerak begitu cepat, di sisi lain tingkat antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah beserta stake holder dan para pemangku kepentingan lainnya masih sangat rendah atau dapat dikatakan belum ada. Hal-hal mendasar mengenai kesepemahaman dan kesepakatan tentang batasan dan definisi DAS, biofisik dan wawasan DAS serta pengelolaannya masih menjadi perdebatan.
3. Masalah penyediaan anggaran dan inovasinya terhadap dana pengelolaan DAS berada dalam pembiayaan sektor dan pengelolaan wilayah administratif pemerintahan. Dalam perspektif ini, pemahaman untuk pengelolaan DAS terpadu belum ada dasar regulasi dan instrumentnya. Pada tingkat yang lebih lanjut, perspektif DAS untuk menuju pada pengelolaan terpadu yang dikaitkan dengan aspek sumber daya, jasa dan sosial ekonomi untuk lingkungan lestari dan rakyat sejahtera masih merupakan wacana.
4. Pemerintah sebagai regulator perlu mengambil langkah pasti, strategis dan cepat dalam upaya menerobos dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan DAS yang semakin meningkat tingkat degradasinya.
5. Undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) serta program yang ditindaklanjuti di tingkat daerah (provinsi serta kabupaten/kota) melalui Perda perlu di implementasikan dan disosialisasikan untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kapasitasnya serta peranserta.
6. Untuk di tingkat teknis dan operasional, forum DAS perlu membangun suatu organisasi tim SIMDAS yang melibatkan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Struktur dan hirarkis di atur dalam payung hukum, terkait aspek-aspek teknis melalui suatu Infrastruktur Data DAS yang mengatur metadata, kepemilikan data, dan aturan penggunaannya di berbagai kalangan (Pemerintah, swasta, akademis, LSM dan masyarakat).
7. Perlu kerjasama lintas sektoral, lintas wilayah administratif dan lintas hukum terkait pengelolaan DAS Terpadu. Untuk itu, perlu payung hukum dan wadah yang mengatur suatu rencana terbentuknya Forum DAS dengan produk-produk kerjanya serta sosialisasi melalui buletin/journal yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat serta semua pemangku kepentingan.

3. PERTANYAAN

Pertanyaan mengenai masalah DAS dan pengelolaannya, adalah :

1. Dalam upaya mendorong realisasi tercapainya kesepakatan pengelolaan DAS secara terpadu, langkah-langkah apa yang harus ditempuh? Dan untuk itu, siapa yang harus mengambil inisiatif ke arah realisasi tersebut?
2. Bila ada suatu kelembagaan/wadah DAS yang telah terbentuk di tingkat internasional termasuk penyusunan acuan-acuan pendekatan hukum, kelembagaan dan kerjasama lintas sektoral dan wilayah administratif serta teknis dalam penyusunan data based, metadata, pemilik data serta teknologinya (hard dan soft system), apakah pemerintah Indonesia sudah mengacu/meratifikasi acuan tersebut untuk di aplikasikan?
3. Bagaimana upaya membangun masyarakat DAS yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kesadaran bersama dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan DAS terpadu?